

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku

- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015.
- Amin, Fakhry. *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Chaidir, Ellydar dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2020.
- Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah* (Edisi Revisi), Stain Press, Purwokerto, 2017.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Effendi Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2015.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Cetakan ke-3, Yogyakarta, FH UII Press, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Mustanir, Ahmad. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, Qiara Media, Pasuruan, 2022.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, terjemahan Rafael Eddy Bosco, Penerbit HuMa, Jakarta, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Cetakan ke-6, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik, Unigres Press, 2022.
- Widjaja, A. W. *Pemerintahan Desa / Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.

Wijk, H.D. Van / Willem Konijnenbelt, dalam Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Hukum Dalam Hubungannya Dengan Hukum Administrasi*, Laksbang, Yogyakarta, 2016.

Jurnal Hukum

Hantoro, Novinato M. Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dalam Sistem Ketatanegaraan, *Kajian Ilmu Pemerintahan*, Vol. 18 Nomor 4, 2018.

Hidayat, Muchamad Angga. Tinjauan Yuridis Tentang Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6 Nomor 1, April 2024.

Pratama, Andhika Satya, dkk. Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Asas Pelayanan Yang Baik Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Di Pemerintah Kota Semarang, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 Nomor 2, 2016

Suryawan, I Gusti Bagus. Undang-Undang Sebagai Sarana Pembaharuan Bagi Masyarakat (Telaah Sosiologis Keberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), *Hasanuddin Law Review*, Vol. 1 Nomor 1, April 2015.

Wijayanto, Dody Eko. Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, *Jurnal Independent*, Vol. 2 Nomor 1, 2017.

Karya Ilmiah

Nugraha, Dicky Adi Setya. *Kekosongan Jabatan Perangkat Desa Dalam Perspektif UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqih Siyasah (Studi di Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)*, Skripsi Pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2020.

Putri, Ninda Risdavianing. *Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021)*, Skripsi pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.